



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor Urut SOP	3/20.1/K/411-200/2020
Tanggal Pembuatan	14-02-2020
Tanggal Revisi	19-06-2024
Tanggal Pengesahan	19-06-2024
Disahkan Oleh	 Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19661005 198703 1 010
Nama SOP	Pemberian Keterangan Ahli Di Persidangan

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.	1	JPT, Administrator
2	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	2	Auditor, PPUPD
3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
4	INPRES jo 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan korupsi.		
5	Nota Kesepahaman Antara Kemendagri, Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara RI Nomor : 100.4.7/437/SJ; Nomor : 1 Tahun 2023; Nomor : NK/1/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan :	
1	SOP Pengawasan Inspektorat	1 Surat Tugas dan SPPD	4 Komputer/Laptop
2	SOP Penanganan Kasus	2 Dokumen LHP	5 Printer
		3 ATK	6 Kamera/handycam
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan :	
1	Waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan materi sidang dan personil	1	Permintaan Pemberian Keterangan Ahli
2	Melakukan komunikasi awal dengan aparat penegak hukum	2	Program Kerja
		3	Berita Acara dan Daftar Hadir Sidang

SOP PEMBERIAN KETERANGAN AHLI DI PROSES PERSIDANGAN UNTUK TINDAK PIDANA KORUPSI

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Kasubag Umum dan Keuangan	JF Perencana	Inspektur	Irbn/JFT	APH	Kelengkapan	Waktu (hari/jam)	Output	Ket
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
PERENCANAAN										
1	Surat Permintaan Keterangan Ahli dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas dasar Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara diterima Subbag Tata Usaha						Surat Permintaan Keterangan Ahli dari APH	1 hari	Surat Permintaan Keterangan Ahli dari APH	
2	Subbag Umum pada hari itu meneruskan ke Inspektur						Disposisi	60 menit	Disposisi Inspektur	
3	Inspektur mendiposisi ke Irbn dan auditor sesuai nama yang tercantum di Surat Permintaan Keterangan Ahli						Surat dan Disposisi	120 menit	Surat Permintaan Keterangan Ahli dari APH dan Disposisi	
4	Pejabat yang mendapat tugas mempersiapkan materi yang dibutuhkan untuk persidangan serta melakukan komunikasi awal dengan APH						Dokumen Pemeriksaan, Surat Perintah Tugas Koordinasi	3 hari	Dokumen Pemeriksaan Dan SPT	
5	Penyusunan konsep surat perintah tugas pemberian keterangan ahli dan konsep surat perintah tugas pendamping ahli						Draft SPT	120 menit	Draf Surat Perintah Tugas.	
6	Reviu konsep surat perintah surat tugas dimintakan tanda tangan persetujuan						Draft SPT	30 menit	Draf Surat Perintah Tugas yang sudah disetujui oleh Inspektur	
7	Penyusunan dan penggandaan surat tugas dan tata kelola kegiatan untuk penugasan tim						Draf Surat Perintah Tugas yang sudah disetujui oleh Inspektur	120 menit	SPT	
8	Penerbitan dan penyerahan surat tugas kegiatan kepada Tim yang ditunjuk						SPT	30 menit	Tanda Terima Surat Penugasan	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Kasubag Umum dan Keuangan	JF Perencana	Inspektur	Irbn/JFT	APH	Kelengkapan	Waktu (hari/jam)	Output	Ket
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Penyusunan Program Kerja Pemberian Keterangan Ahli				↓ 		Surat Perintah Tugas dan Dokumen PKA	1 hari	SPT dan PKA	
	PELAKSANAAN				↓					
10	Pelaksanaan pemberian keterangan ahli di persidangan				↓ 		SPT	1 hari	Berita Acara dan daftar hadir sidang	
	PELAPORAN				↓					
11	Penyusunan draf laporan hasil pemberian keterangan ahli dengan menerapkan mekanisme berjenjang				↓ 		Draft Laporan	1 hari	Draf Laporan hasil Pemberian Keterangan Ahli	
12	Penyampaian draf laporan hasil pemberian keterangan ahli kepada Inspektur			↓ 			Draft Laporan dan reviu sheet Pengendali Mutu	120 menit	Draf Laporan	
13	Penandatanganan laporan hasil pemberian keterangan ahli oleh Inspektur			↓ 			Laporan	120 menit	Laporan final dan telah ditanda tangani Inspektur	
14	Pengarsipan laporan hasil pemberian keterangan ahli di Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (Tim Pengolah Data)			↓ 			Laporan hasil pemberian keterangan ahli telah ditanda tangani Inspektur	30 menit	Laporan final dan telah ditanda tangani Inspektur	